RENCANA KERJA
(R E N J A)
T.A 2026



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kompleks Bumi Praja, Anduonuhu Kendari 93232

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala RahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 dapat disusun sesuai dengan rencana dan Pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai format dokumen resmi Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) Bapenda tahun 2025 juga mengevaluasi sejauhmana keberhasilan program kegiatan yang dilakukan pada tahun yang lalu serta menganalisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 ini diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat tercapai.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 31 Juli 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MUJAHIDIN, S.Pd.,SH.,MH
19710623 199803 1 008

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Restra SKPD 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 40

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 42

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 43

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 44

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 44

3.3. Program dan Kegiatan 45

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Pendanaan Perangkat Daerah 50

BAB V PENUTUP 61




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas-tugas melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan sebagai koordinator dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah lainnya. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, sistematis, dan pencapaian kinerja yang optimal maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan langkah- langkah strategis yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. Program dan kegiatan tersebut disusun dalam bentuk dokumen perencanaan satu tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah.

Pada prinsipnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah mengacu pada draft dokumen Rencana Strategis (Renstra) dimana didalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah memiliki kesesuaian, tidak menyimpang, dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 yang telah ditetapkan sehingga tujuan, sasaran dan target pembangunan dapat direalisasikan secara optimal.

1.2 **Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No.244) ;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);




10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);

18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Fenstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah
2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 disusun dengan komposisi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan




BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP




BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan rencana program / kegiatan tahun 2025, penyusunan rencana program /kegiatan tahun 2024 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2025, pencapaian target rencana startegis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 serta realisasi pelaksanaan APBD Badan Pendapatan Daerah Sampai dengan Akhir Tahun 2024, sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukan serta Pajak Rokok. Pada tahun 2024 penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan penerimaannya sebesar **Rp. 1.417.378.807.649,-** dan terealisasi sebesar **Rp 1.244.593.262.730,-.** Adapun rincian target dan realisasi Pajak daerah sebagai berikut :

TARGET & REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2023-2024

No.	Jenis Penerimaan	Target dan Realisasi 2023 (n-2)			Target dan Realisasi 2024 (n-1)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
I.	**Pajak Daerah**	**1.417.378.807.649**	**1.286.194.768.013**	**90.74**	**1.417.378.807.649**	**1.244.593.262.730**	**87,81**
1	Pajak Kendaraan Bermotor	305.622.345.000	265.129.992.139	86,75	305.622.345.000	264.917.694.222	86,68
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	352.797.450.000	331.981.183.982	94,10	352.797.450.000	336.019.243.240	95,24
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	500.276.700.000	490.427.466.043	98,03	500.276.700.000	484.027.266.503	96.75




No.	Jenis Penerimaan	Target dan Realisasi 2023 (n-2)			Target dan Realisasi 2024 (n-1)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4	Pajak Air Permukaan	35.948.740.000	1.887.014.208	5,25	35.948.740.000	7.891.205.529	21,95
5	Pajak Rokok	222.733.572.649	196.769.111.641	88,34	222.733.572.649	151.737.853.236	68,13

Adapun pencapaian realisasi tersebut diatas secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk target dan capaian realisasi tahun 2023 target PKB yang ditetapkan sebesar Rp. 305.622.345.000,- dan realisasi sebesar Rp. 265.129.992.139,- atau mencapai persentase sebesar 86,75%. Sedangkan untuk tahun 2024, target PKB yang ditetapkan sebesar Rp. 305,622,345,000,- hanya mencapai realisasi sebesar Rp 264.917.694.222,- atau mencapai persentase sebesar 86,68%.

Jumlah kendaraan bermotor yang membayar PKB akan mempengaruhi secara langsung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin banyak jumlah kendaraan yang membayar PKB, maka akan meningkatkan penerimaan PKB. Akan tetapi dalam prosesnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sering mendapatkan kendala .

Perilaku Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara masih menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Salah satu penyebab utama terjadinya tunggakan atau piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kondisi kendaraan yang hilang atau mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan, sehingga tidak dapat lagi digunakan. Dalam situasi seperti ini, pemilik kendaraan atau wajib pajak cenderung enggan untuk membayar pajak, karena menganggap kendaraan tersebut sudah tidak bernilai guna. Selain itu, pencurian kendaraan bermotor juga menjadi faktor penyebab tunggakan, karena kendaraan yang hilang tidak dapat ditemukan kembali, dan pemilik merasa tidak lagi berkewajiban untuk membayar pajak.

Kemudahan dalam memperoleh kendaraan bermotor baru turut berkontribusi terhadap permasalahan ini, terlebih ketika disertai dengan penggunaan data kepemilikan yang tidak valid atau fiktif, yang menyulitkan proses penagihan pajak. Di sisi lain, kendala ekonomi juga memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, terutama bagi

mereka yang mengalami tekanan finansial. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan juga tampak dari banyaknya wajib pajak yang lupa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Permasalahan ini semakin kompleks karena belum adanya sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga tidak ada efek jera yang kuat dan penegakan hukum pun menjadi lemah. Seluruh kondisi ini saling berkaitan dan memerlukan solusi yang menyeluruh, baik dari sisi kebijakan, pelayanan, maupun penegakan hukum, agar kepatuhan pajak masyarakat dapat meningkat.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk target dan capaian realisasi Tahun 2023 BBNKB yaitu dengan target sebesar Rp. 352.797.450.000,- mencapai realisasi sebesar Rp. 331.981.183.982,- atau mencapai persentase sebesar 94.10%., untuk Tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 352.797.450.000,- mencapai realisasi sebesar Rp. 336.019.243.240,- atau mencapai persentase sebesar 95,24%. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Sulawesi Tenggara tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2024, kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,03 persen. Meskipun capaian ini masih dalam kisaran target, namun pertumbuhan tersebut mencerminkan perlambatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah menurunnya daya beli masyarakat, khususnya di kelompok kelas menengah, yang merupakan penggerak utama konsumsi domestik. Tidak hanya itu, laporan BPS Indonesia juga menunjukkan adanya penyusutan populasi kelas menengah, yang berdampak langsung pada penurunan volume belanja konsumtif.

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun indikator makro ekonomi menunjukkan pertumbuhan, namun secara mikro terdapat tekanan yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga sehingga berdampak terhadap daya beli konsumen terhadap pembelian kendaraan baru.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk target dan capaian realisasi Tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.500.276.700.000,- mencapai realisasi sebesar Rp.490.427.466.043,-. atau mencapai persentase sebesar 98,03%. dan pada Tahun 2024 Dari

target yang ditetapkan sebesar Rp.500.276.700.000,- mencapai realisasi sebesar Rp. 484.027.266.503,-. atau mencapai persentase sebesar 96,75%. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan capaian realisasi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), diperlukan ketersediaan dan pemanfaatan data yang akurat dan terkini, khususnya yang berkaitan dengan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) dan distribusinya. Salah satu strategi penting dalam optimalisasi penerimaan pajak ini adalah dengan memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan BBM, khususnya pada sektor-sektor dengan konsumsi tinggi seperti pertambangan.

Sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini menunjukkan tren peningkatan aktivitas yang signifikan, baik dalam skala produksi maupun mobilisasi alat berat dan kendaraan operasional yang menggunakan BBM dalam jumlah besar. Hal ini merupakan potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kontribusi PBBKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tanpa sistem pengawasan yang efektif, banyak potensi penerimaan yang belum tergali secara maksimal, terutama dari penggunaan BBM non-subsidi yang digunakan dalam aktivitas pertambangan.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas ESDM, dan instansi terkait lainnya untuk membangun sistem integrasi data antara kuota distribusi BBM dengan realisasi pemakaian di lapangan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan, pelaporan, dan pelacakan distribusi BBM juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pertambangan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

4. Pajak Air Permukaan (PAP)

Pada Tahun 2023, realisasi penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp35.948.740.000, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp1.887.014.208 atau setara dengan 5,25% dari total target. Hal ini mencerminkan adanya tantangan yang

cukup besar dalam optimalisasi potensi penerimaan dari sektor tersebut pada tahun tersebut.

Namun demikian, pada Tahun 2024 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Dengan target yang tetap sebesar Rp35.948.740.000, realisasi hingga periode tertentu mencapai Rp7.891.205.529 atau sebesar 21,95%. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan yang nyata dalam hal intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan PAP, baik melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola, maupun upaya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya air permukaan oleh pelaku usaha maupun instansi pengguna lainnya.

Peningkatan ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat strategi pengelolaan penerimaan pajak daerah, khususnya melalui sinergi antarsektor serta penerapan sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya lanjutan masih diperlukan untuk menutup kesenjangan antara target dan realisasi, agar potensi PAP sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

5. Pajak Rokok

Pada Tahun 2023 target Pajak Rokok sebesar Rp. 222.733.572.649.- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 196.769.111.641.- atau persentase sebesar 88,34%. pada Tahun 2024 dari target sebesar Rp. 222.733.572.649.- mencapai realisasi sebesar Rp. 151.737.853.236.- atau persentase sebesar 68,13%.

Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap turunnya realisasi di antaranya adalah fluktuasi konsumsi rokok, perubahan pola distribusi, kendala dalam mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, serta potensi peredaran rokok ilegal yang belum sepenuhnya terpantau. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan pengawasan, peningkatan sinergi antarinstansi, serta optimalisasi pelaporan dan pemantauan untuk memastikan target penerimaan dapat tercapai secara maksimal di tahun berjalan maupun tahun-tahun mendatang.

Adapun trend pencapaian target pendapatan pajak daerah tahun 2022 s/d 2024 terakhir sebagai berikut :

PERBANDINGAN TARGET & REALISASI PAJAK DAERAH

Tahun 2022–2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2022	**1.141.269.003.345**	**1.094.457.471.310**	**95,81**
2023	**1.417.378.807.649**	**1.286.194.768.013**	**90,74**
2024	**1.417.378.807.649**	**1.244.593.262.730**	**87,81**

Berdasarkan data pada tabel perbandingan target dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika yang signifikan dalam kinerja penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada Tahun 2022, target pendapatan dari sektor pajak daerah ditetapkan sebesar Rp1.141.269.003.345, dengan realisasi mencapai Rp1.094.457.471.310, atau sebesar 95,81% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, kinerja penerimaan pajak daerah cukup optimal dan hampir mencapai target secara keseluruhan.

Memasuki Tahun 2023, target mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp276.109.804.304 atau naik sekitar 24% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp1.417.378.807.649. Namun, meskipun terdapat peningkatan pada sisi target, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp1.286.194.768.013 atau 90,74%, yang menunjukkan adanya penurunan efektivitas dalam pencapaian target dibandingkan tahun 2022.

Pada Tahun 2024, target pajak daerah masih dipertahankan pada angka yang sama seperti tahun 2023, yaitu Rp1.417.378.807.649. Namun realisasi hingga periode berjalan tercatat sebesar Rp1.244.593.262.730, atau sekitar 87,81% dari target. Hal ini mencerminkan tren penurunan dalam persentase capaian target penerimaan pajak daerah selama tiga tahun terakhir, meskipun secara nominal realisasi penerimaan masih lebih tinggi dibanding tahun 2022.

Salah satu faktor yang turut memengaruhi penurunan persentase realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2024 adalah menurunnya penerimaan dari sektor Pajak Rokok. Berdasarkan data, realisasi Pajak Rokok mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak langsung terhadap total realisasi Pendapatan Asli Daerah.Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi langsung terhadap optimalisasi penerimaan dari sektor tersebut, mengingat Pajak Rokok bukan merupakan jenis pajak yang dikelola secara langsung oleh daerah. Penerimaan dari Pajak Rokok diterima oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap objek maupun subjek Pajak Rokok.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penguatan kemandirian fiskal daerah, karena fluktuasi penerimaan dari sektor Pajak Rokok tidak dapat sepenuhnya dikendalikan melalui kebijakan atau langkah teknis di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk mengimbangi potensi penurunan dari komponen DBH seperti Pajak Rokok, pemerintah daerah perlu memperkuat sektor-sektor pajak lain yang dikelola secara langsung, serta mendorong inovasi dan optimalisasi penggalian potensi pajak melalui pemutakhiran data, pengawasan intensif, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hingga saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya melakukan inovasi terkait optimalisasi pendapatan daerah, agar pendapatan daerah terus meningkat pada setiap tahunnya.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pada tahun 2024 penerimaan retribusi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan penerimaannya sebesar **Rp. 647.500.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp 516.618.250,-.** Adapun rincian target dan realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut :




TARGET & REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023-2024

No.	Jenis Penerimaan	Target dan Realisasi 2023 (n-2)			Target dan realisasi 2024 (n-1)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
I.	**Retribusi Daerah**	**647.500.000**	**348.038.016**	**53,75**	**647.500.000**	**516.618.250**	**79,79**
1	Retribusi Tempat Khusus Parkir - Jasa Parkir Lippo Plaza	500.000.000	232.212.900	46,44	500.000.000	360.094.800	72,02
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Rumah Dinas	130.000.000	109.783.116	84,45	130.000.000	141.723.720	190,02
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Kantin	2.500.000	6.040.000	241,6	2.500.000	14.800.000	592,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemasangan Papan Reklame MTQ	15.000.000	-	-	15.000.000		-

Secara rinci, realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir dari Jasa Parkir Lippo Plaza pada Tahun 2024 mencapai Rp360.094.800 dari target sebesar Rp500.000.000, atau sebesar 72,02%. Persentase ini meningkat cukup signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar 46,44%. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan dan penagihan retribusi parkir, meskipun masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Sementara itu, untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khususnya dari sewa rumah dinas, realisasi penerimaan Tahun 2024 bahkan melampaui target sebesar Rp130.000.000, dengan capaian sebesar Rp141.723.720 atau 190,02%. Capaian ini mencerminkan adanya efektivitas dalam pemanfaatan aset daerah serta kepatuhan penyewa terhadap kewajiban retribusi.

Realisasi dari sewa kantin juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian sebesar Rp14.800.000 dari target sebesar Rp2.500.000, atau 592,00%. Hal ini mencerminkan pengelolaan aset yang produktif dan potensi peningkatan pendapatan dari aset-aset kecil yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Namun demikian, untuk jenis penerimaan dari pemasangan papan reklame MTQ, baik pada Tahun 2023 maupun Tahun 2024, tidak terdapat realisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada kegiatan atau kesepakatan sewa terkait pemasangan reklame tersebut, atau terdapat kendala administratif yang menyebabkan belum ditagihnya retribusi dimaksud.

Secara keseluruhan, tren peningkatan capaian retribusi daerah di Tahun 2024 menunjukkan perbaikan dalam kinerja pengelolaan dan pemanfaatan aset serta jasa daerah. Meskipun masih terdapat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai, terutama pada sektor parkir, namun pencapaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mendorong optimalisasi pendapatan retribusi di tahun-tahun mendatang melalui perbaikan regulasi, peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah, dan digitalisasi sistem monitoring dan pembayaran retribusi.

3. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Hasil Penjualan Aset Lainnya. Pada tahun 2024 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan penerimaannya sebesar **Rp. 7.488.141.224,-** dan terealisasi sebesar **Rp 9.822.700.758,-.** Adapun rincian target dan realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut :

TARGET & REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH TAHUN 2023-2024

No.	Jenis Penerimaan	Target dan Realisasi 2023 (n-2)			Target dan realisasi 2024 (n-1)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
I.	**Lain - Lain PAD yang Sah**	**7.488.141.224**	**7.697.809.568**	**102,80**	**7.488.141.224**	**9.822.700.758**	**131,18**
1	Denda Pajak Kendaraan Bermotor	7.306.000.000	7.697.809.568	105,36	7.306.000.000	9.809.932.562	134,27
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	182.141.224	-	-	182.141.224	12.768.196	7,01

Pada Tahun 2024, realisasi penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah menunjukkan kinerja yang sangat positif. Dari target sebesar Rp7.488.141.224, realisasi penerimaan mencapai Rp9.822.700.758 atau setara dengan 131,18%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2023, di mana realisasi tercatat sebesar Rp7.697.809.568 atau 102,80% dari target yang sama.

Kontributor utama terhadap capaian tersebut berasal dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor, dengan target yang ditetapkan sebesar Rp7.306.000.000 dan realisasi Tahun 2024 mencapai Rp9.809.932.562, atau sebesar 134,27%. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang telah mencapai 105,36% dari target. Hal ini mencerminkan meningkatnya efektivitas dalam pengawasan, penegakan aturan, serta ketegasan dalam penerapan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, pos penerimaan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya belum menunjukkan capaian yang optimal. Pada Tahun 2023, tidak terdapat realisasi dari jenis penerimaan ini. Sedangkan pada Tahun 2024, dari target sebesar Rp182.141.224, hanya terealisasi sebesar Rp12.768.196, atau sebesar 7,01%. Capaian yang rendah ini dapat disebabkan oleh terbatasnya proses penjualan aset daerah atau belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset-aset yang dapat dijual.

Secara keseluruhan, kinerja Lain-lain PAD yang Sah mengalami tren peningkatan yang sangat baik, terutama karena kontribusi signifikan dari penerimaan denda pajak kendaraan. Hal ini menjadi indikator keberhasilan dalam upaya intensifikasi pendapatan serta penguatan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan dalam optimalisasi penerimaan dari komponen lain, khususnya dari hasil penjualan aset, melalui perbaikan tata kelola aset daerah dan percepatan proses legalisasi serta pelepasan aset yang tidak lagi produktif.

B. BELANJA DAERAH

Terdapat 2 (Dua) program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan total anggaran setelah perubahan sebesar

Rp. 81.400.151.320,- (Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp. 76.803.920.366,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan persentase capaian realisasi sebesar 94,35% Adapun Uraian dari masing-masing program beserta kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perkantoran pada Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatannya meliputi penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan perkantoran tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 77.576.958.420,- dan realisasi sebesar Rp. 73.681.081.482,- dengan persentase capaian realisasi sebesar 94,98% Adapun kegiatannya meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Alokasi anggaran Rp. 128.226.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.788.900,- dengan persentase 94,20%;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan Alokasi anggaran Rp. 15.513.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.213.900,- dengan persentase 20,72%;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Alokasi anggaran Rp. 15.513.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.213.900,- dengan persentase 20,72%;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 6.437.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.837.500,- dengan persentase 59,61%;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 6.437.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.837.500,- dengan persentase 59,61%;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 65.257.350,- dan terealisasi sebesar

Rp. 46.661.850,- dengan persentase 94%;

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 128.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.447.200,- dengan persentase 71,50%;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Alokasi anggaran Rp. 58.941.414.676,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.592.631.006,- dengan persentase 96,02 %;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas, dengan Alokasi anggaran Rp. 886.696.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 856.640.000,- dengan persentase 96,61%;
- Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 27.843.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.893.750,- dengan persentase 96,59 %;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran Rp 97.731.500 dan terealisasi sebesar Rp. 96.174.500 dengan persentase 98,41%;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 5.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0 %;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan Alokasi anggaran Rp. 86.439.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.382.000,- dengan persentase 82,58%;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 153.047.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 143.636.900,- dengan persentase 93,85%;

3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah.

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 30.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- dengan persentase 100%.
- Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 138.288.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 137.547.000,- dengan persentase 99,46%.

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 313.651.000,- dan terealisasi sebesar Rp 297.290.235,- dengan persentase 94,78%;
- Penetapan Wajib Retribusi Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 49.472.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.272.500,- dengan persentase 45,02%;

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 59.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.957.000,- dengan persentase 88,41%;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 33.227.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.350.000,- dengan persentase 91,34%;
- Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi dengan alokasi anggaran Rp. 188.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.489.961,- dengan persentase 92,25%;

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi anggaran Rp. 139.725.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.725.900,- dengan persentase 69,94%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Alokasi anggaran Rp. 1.137.328.388,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.137.235.738,- dengan persentase 99,99%.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Alokasi anggaran Rp. 403660550,- dan terealisasi sebesar Rp. 381.392.722,- dengan persentase 94,48%.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan Alokasi anggaran Rp. 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.900.000,- dengan persentase 91,67%.
- Penyediaan Bahan/Material dengan Alokasi anggaran Rp. 400.001.820,- dan terealisasi sebesar Rp. 398.197.800,- dengan persentase 99,55%.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Alokasi anggaran Rp. 348.228.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 340.903.500,- dengan persentase 97,90%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Alokasi anggaran Rp. 1.357.297.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.309.233.006,- dengan persentase 96,46%.
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 1.129.484.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 644.219.900,- dengan persentase 57,04%.

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran Rp. 580.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 576.000.000,- dengan persentase 99,31%.
- Pengadaan Mebel dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 100.048.490,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.025.000,- denganpersentase 99,98%.
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.270.123.996,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.246.946.000 dengan persentase 98,18%.
- Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp. 4.424.916.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.090.165.975 dengan persentase 92,43%.

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.358.630,- dengan persentase 56,35%
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.115.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.110.472.810,- dengan persentase 99,59%
- Penyediaan jasa pelayan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.258.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.220.760.000,- dengan persentase 97%.

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Alokasi anggaran Rp. 333.174.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 327.458.700,- dengan persentase 98,28%.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran Rp. 222.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.261.824,- dengan persentase 88,66%.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 338.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 334.842.310 ,- dengan persentase 98,96%.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dengan Alokasi anggaran Rp. 720.157.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 720.143.265,- dengan persentase 100 %.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Alokasi anggaran Rp. 813.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 599.020.000,- dengan persentase 73,61 %.

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perkantoran terkait optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan anggaran sebesar Rp. 3.823.192.900,- dan realisasi sebesar Rp. 3.122.838.884,- dengan persentase capaian realisasi sebesar 81,68%

Adapun Kegiatannya Meliputi :

1. **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 692.941.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 418.175.854,- dengan persentase 60,35%.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 239.328.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.922.8000,- dengan persentase 91,60%.
- Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah,dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.459.000,- dan terealisasisebesar Rp. 155.909.000,- dengan persentase 67,65%.
- Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak dengan alokasi anggaran Rp. 37.765.500,- dan realisasi sebesar Rp. 36.986.000,- dengan persentase sebesar 97,94%
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 959.226.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 842.853.780,- dengan persentase 87,87%.
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 100.631.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.347.000,- dengan persentase 97,73%.
- Penagihan Pajak Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 258.093.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 153.155.250,- dengan persentase 59,34%.
- Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 1.304.748.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.198.184.000,- dengan persentase 91,83%.




Berikut ini Merupakan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah sampai dengan Tahun 2024 (Triwulan IV) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5	**Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5.02	**Unsur Keuangan**									
05.02.2001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	1	3	9	3
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3

5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	1	2	6	3
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	2	2	2	1	2	6	3

		SKPD								
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	315	315	315	315	1	315	315	3
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	2	2	1	2	6	3
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	315	315	315	315	1	315	315	3

5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	2	2	1	2	6	3
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	34	34	34	34	1	34	102	3

5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	2	2	1	2	6	3
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.01.1.03.03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2	2	2	2	1	2	6	3
5.02.01.1.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	4	4	1	4	12	3

5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.03.07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan PAD diluar pajak**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	4	4	1	4	12	3
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis sertaPengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2	2	2	2	1	2	6	3
5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	1	1	1	1	1	3	3

5.02.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	5	5	5	5	1	5	15	3
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36	36	36	36	1	36	108	3
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10	10	10	10	1	10	30	3
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	500	500	500	500	1	500	1500	3
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50	50	50	50	1	50	150	3
5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	36	36	36	36	1	36	108	3
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	345	345	345	345	1	345	1035	3
5.02.01.1.05.	Pemulangan Pegawai yang	Jumlah Pegawai Pensiun yang	10	10	10	10	1	10	30	3

06	Pensiun	Dipulangkan								
5.02.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5	5	5	5	1	5	15	3
5.02.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	20	20	20	20	1	20	60	3
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	329	329	329	329	1	329	987	3
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100	1	100	300	3
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100	1	100	300	3
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	1	5	15	3
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200	200	200	200	1	200	600	3
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100	100	100	1	100	300	3
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500	500	500	500	1	500	500	3
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22	22	22	22	1	22	66	3
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1800	1800	1800	1800	1	1800	5400	3
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	18	18	18	1	18	54	3

5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000	1000	1000	1000	1	1000	3000	3
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	1	1	3	3
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26	26	26	26	1	26	78	3
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	10	10	10	1	10	30	3
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	10	10	10	1	10	30	3
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	100	100	100	1	100	300	3

5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	10	10	10	1	10	30	3
5.02.01.1.07.07	Pengadaan Asset Tetap Lainnyaa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	2	2	2	1	2	6	3
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Asset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	2	2	1	2	6	3
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500	500	500	500	1	500	1500	3
5.02.01.1.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250	250	250	250	1	250	750	3
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	1	12	36	3

5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.01.1.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	10	10	1	10	30	3
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	98	98	98	98	1	98	294	3
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	35	35	35	1	35	105	3

5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214	214	214	214	1	214	642	3
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan asset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	26	26	26	1	26	78	3
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	10	10	10	1	10	30	3
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihra/Direhabilitasi	18	18	18	18	1	18	54	3

5,02,04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentasi Peningkatan PAD**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupaan Kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	5	5	5	1	5	15	3
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	4	4	4	4	1	4	12	3
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	4	4	4	1	4	12	3
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	2	2	1	2	6	3
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	5	5	5	1	5	15	3
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	13	13	13	13	1	13	39	3

		Daerah								
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	17	17	17	17	1	17	51	3
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	12	12	12	12	1	12	36	3
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	4	4	4	4	1	4	12	3
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	4	4	4	1	4	12	3
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	30	30	30	30	1	30	90	3

5.02.04.1.01. 14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	3	3

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu: melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak daerah provinsi disamping sebagai koordinator di bidang pendapatan lainnya. Target penerimaan Pajak Daerah merupakan ukuran pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang setiap tahunnya diharapkan terus meningkat

Berdasarkan analisis terhadap pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan maka secara umum dapat disimpulkan bahwa semua target indikator sasaran telah tercapai dengan realisasi sebagaimana terlampir pada tabel sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
1	TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE KENAIKAN PENDAPATAN DAERAH ANTAR TAHUN ANGGARAN	5%	- 2,95 %

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja, indikator sasaran strategis **"Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran"** yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara **menargetkan kenaikan sebesar 5%**. Namun demikian, realisasi yang dicapai justru menunjukkan **penurunan sebesar -2,95%** dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu perbandingan realisasi kinerja penerimaan pajak daerah tahun 2022 terhadap penerimaan realisasi tahun 2024 sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah 2023 & 2024

TAHUN	2023	2024
REALISASI	**1.293.116.142.662**	**1.254.932.582.008**

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp **1.293.116.142.662**,- sedangkan tahun 2024 sebesar Rp **1.254.932.582.008**,-sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 38.183.560.654,-. Dengan persentase -2,95%.

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\textbf{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Daerah Tahun 2023}}{\text{Pendapatan Daerah Tahun 2024} - \text{Pendapatan Daerah Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.293.116.142.662}{1.254.932.582.008 - 1.293.116.142.662} \times 100\%$$

$$= \frac{1.293.116.142.662}{-38.183.560.654} \times 100\%$$

$$= -2.95\%$$

Capaian negatif ini mengindikasikan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan **tidak tercapai**, dan perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya kinerja pendapatan. Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain:

1. **Penurunan realisasi penerimaan dari jenis pajak tertentu**, khususnya Pajak Rokok, yang tidak dapat dilakukan optimalisasi oleh pemerintah daerah karena bersifat dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
2. **Keterbatasan kewenangan daerah** dalam pengembangan sumber-sumber pendapatan baru, khususnya yang berasal dari sektor-sektor strategis namun belum tergarap secara maksimal.
3. **Ketidakstabilan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha**, yang turut mempengaruhi kepatuhan dan kemampuan membayar pajak serta retribusi daerah.
4. **Faktor kebijakan nasional dan penyesuaian regulasi**, seperti perubahan tarif, penghapusan denda, atau kebijakan insentif yang berdampak terhadap besaran penerimaan daerah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu dilakukan perumusan strategi perbaikan dan penguatan, baik melalui **intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan**,

peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi PAD, serta mendorong optimalisasi pelayanan berbasis digital guna mendukung peningkatan kepatuhan dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah ke depannya.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan hasil telaahan tentang Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan beberapa isu penting yang perlu ditangani dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu (rencana,kebijakan, inovasi 2026)

1) Peningkatan PAD dari sisi Pajak Daerah dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem Samsat SIGAP, pelayanan dengan Samsat Keliling melalui program Samsat Keliling, pengembangan pelayanan melalui Samsat Corner/Samsat Gerai di pusat perbelanjaan/Mall ;
2) Bekerjasama dengan aparat pemerintah Kabupaten/Kota terkait penagihan Pajak Kendaraan Bermotor ;
3) Bekerjasama dengan lintas sektor terkait peningkatan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan BBM dan Alat Berat khususnya pada sektor-sektor dengan konsumsi tinggi seperti pertambangan ;
4) Peningkatan Retribusi Daerah melalui retribusi iklan Videotron di Kabupaten / Kota ;
5) Perbaikan sarana dan prasarana kantor seperti Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor & Pembangunan Gedung Kantor UPTB ;
6) Bekerjasama dengan aparat pemerintah Kabupaten/Kota dengan sosialisasi/ penyuluhan tentang Masyarakat Taat Pajak ;
7) Peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pajak dan Retribusi Daerah ;
8) Peningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap RKPD dikakukan dengan membandingkan RKPD dengan analisis kebutuhan, perbandingan antara hasil analis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/ tidak sesuai, cocok/ketidakccocokan besarannya (anggaran/ volume/ satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pendapatan Dearah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Perangkat Daerah yang memiliki urusan penunjang, dalam pelalsanaan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik usulan masyarakat, LSM, perguruang tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disamping sebagai koordinator di bidang Pendapatan Daerah lainnya maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat secara maksimal menunjang dan memperkuat kemampuan badan dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak daerah sehingga Pendapatan Daerah bisa terwujud secara maksimal. Hal ini penting mengingat selaku instansi yang mendukung pendanaan belanja pemerintah diharapkan mampu memberikan sokongan dana yang cukup agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) telah ditetapkan tujuan dan sasaran renja skpd Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain-lain yang Sah ;
2. Meningkatkan akurasi data objek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra

5. Peningkatan SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Menciptakan tertib Administrasi Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah.
7. Peningkatan Koordinasi dan pengawasan

Setelah ditetapkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya ditentukan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Adapun sasaran rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan pajak daerah yang aspiratif transparan dan akuntabel.
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana kantor
5. Terciptanya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang handal.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah dan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pencapaian target pendapatan daerah Berikut 2 (dua) program yang didukung oleh 10 (Sepuluh) kegiatan dan 85 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah

1) Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
2) Pengamanan barang milik daerah SKPD
3) Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD
4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan barang milik daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi daerah
3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi daerah
5) Pengolahan Data Retribusi daerah
6) Penetapan Wajib Retribusi Daerah

7) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8) Pemindahan Tugas ASN
9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10) Sosialisasi Perundang-undangan
11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

f. Administrasi Umum Perangkat daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyediaan Bahan/Material
8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

g. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pengadaan Mebel
4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) Pengadaan Aset Tetap Lainnyaa
6) Pengadaan Aset Tak Berwujud
7) Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunisasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
4) Pemeliharaan asset tak berwujud
5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4) Penyediaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Pajak Daerah
5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

7) Penetapan Wajib Pajak Daerah
8) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10) Penagihan Pajak daerah
11) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
12) Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah
13) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
14) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Program dan Kegiatan disajikan dalam table berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/ Kegiatan *(Output)*	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Penunjang Urusan Pemerintahan**								
5.02	**Unsur Keuangan**								
05.02.2001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**100%**				**100%**	**83.844.558.567**
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu**		**100%**	**460.797.739,50**			**100%**	**479.418.771,50**
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	109.582.242,00			4	114.800.444,00
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	16.288.492,50			1	17.064.135,00

5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	16.288.492,50			1	17.064.135,00
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	6.864.322,50			1	7.191.195,00
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	6.864.322,50			1	7.191.195,00
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	69.756.067,50			1	69.756.067,50
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		.2	235.153.800,00			2	246.351.600,00
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan**		**100%**	**67.274.189.380 ,50**			**100%**	**70.477.722.208, 00**
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		360	65.931.949.191, 00			370	69.071.565.819,0 0
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	965.264.842,50			12	1.011.229.835,00

5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2	29.235.937,50			2	30.628.125,00
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	60.859.575,00			1	63.757.650,00
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	6.285.132,00			1	6.584.424,00
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		4	19.674.795,00			4	20.611.690,00
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		18	160.699.507,50			18	168.351.865,00
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	100.220.400,00			1	104.992.800,00
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**100%**	**378.326.865,00**			**100%**	**396.342.430,00**
5.02.01.1.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2	85.906.800,00			2	89.997.600,00

5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2	31.500.000,00			2	33.000.000,00
5.02.01.1.03.03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		2	33.406.800,00			2	34.997.600,00
5.02.01.1.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		2	96.810.000,00			2	101.420.000,00
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	3.780.000,00			2	3.960.000,00
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	93.516.465,00			4	97.969.630,00
5.02.01.1.03.07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		2	33.406.800,00			2	34.997.600,00
5.02.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan PAD diluar pajak**		**100%**	**699.142.375,00**			**100%**	**742.145.750,00**
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		2	224.321.350,00			2	244.714.200,00
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis sertaPengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		2	116.913.300,00			2	122.480.600,00

5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		4	80.808.000,00			4	84.656.000,00
5.02.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		4	85.663.200,00			4	89.742.400,00
5.02.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		4	46.956.525,00			4	49.192.550,00
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		4	144.480.000,00			4	151.360.000,00
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM**		**100%**	**644.272.650,00**			**100%**	**674.952.300,00**
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		17	62.643.000,00			17	65.626.000,00
5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		12	53.890.200,00			12	56.456.400,00
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12	52.980.900,00			12	55.503.800,00
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		17	210.971.250,00			17	221.017.500,00

5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50	151.609.500,00			50	158.829.000,00
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10	112.177.800,00			10	117.519.600,00
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran**		**100%**	**3.552.275.541,20**			**100%**	**3.721.431.519,30**
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	10.980.900,00			1	11.503.800,00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10	39.066.636,00			10	40.926.952,00
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	33.106.920,00			1	34.683.440,00
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		500	914.049.300,20			500	957.575.457,30
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	349.693.050,00			12	366.345.100,00
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	11.340.000,00			1	11.880.000

5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	850.815.000,00			1	891.330.000,00
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		18	298.481.400,00			18	312.694.800,00
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	1.034.250.000,00			12	1.083.500.000,00
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4	10.492.335,00			4	10.991.970,00
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan**		**100%**	**5.780.000.000**			**100%**	**7,738,600,000**
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4	1.700.000.000			4	1.900.000.000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	500.000.000			1	600.000.000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10	2.500.000.000			10	2.700.000.000
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	700.000.000			2	800.000.000
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		1	380.000.000			1	400.000.000

	Lainnya	Disediakan							
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang yang tersedia**		**100 %**	**3.530.000.000**			**100%**	**3.940.000.000**
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	30.000.000			12	40.000.000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	1.400.000.000			12	1.600.000.000
5.02.01.1.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	300.000.000			12	400.000.000
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan mum Kantor yang Disediakan		12	1.800.000.000			12	1.900.000.000
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**		**100%**	**2.820.000.000**			**100%**	**3.275.000.000**
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		35	320.000.000			35	340.000.000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		200	400.000.000			200	500.000.000

5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		18	1.000.000.000			18	1.200.000.000
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	150.000.000			1	160.000.000
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2	700.000.000			2	800.000.000
5,02,04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentasi Peningkatan PAD**		**5%**	**4.732.001.900,00**			**5%**	**4.829.438.900,00**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupaan Kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah**		**100%**	**4.732.001.900,00**			**100%**	**4.829.438.900,00**
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		4	122.246.250,00			4	128.067.500,00
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		4	181.763.400,00			4	190.418.800,00

5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasa Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		4	309.088.500,00			4	323.807.000,00
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		4	181.207.950,00			4	189.836.900,00,
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		4	410.923.800,00			4	430.491.600,00
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		4	164.430.000,00			4	172.260.000,00
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		4	188.139.000,00			4	197.098.000,00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		4	630.264.600,00			4	660.277.200,00
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		4	1.743.638.400,00			4	1.826.668.800,00
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		4	800.000.000			1	900.000.000

5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti		4	300.000.000			4	350.000.000

BAB V

P E N U T U P

Demikian Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan yang berisikan rencana program dan kegiatan tahun 2026 serta memuat perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan Pajak Daerah secara maksimal.

Dalam Penyusunan Renja Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengatasi berbagai masalah yang mengemuka dan mendorong kearah upaya terciptanya perwujudan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Untuk dapat merealisasikan maksud tersebut, diperlukan dukungan dan peran aktif dari setiap pelaksana baik dari pihak pemerintah maupun pihak diluar pemerintah, utamanya para investor yang mempunyai maksud melakukan investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta adanya dukungan sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Kendari, 31 Juli 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MUJAHIDIN, SPd.,SH.,MH
19710623 199803 1 008